



**PEMERINTAH KOTA SERANG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA SERANG  
(BPKAD)**

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2023**

**Jl. Jenderal Sudirman, Komplek KSB Serang  
Telp. (0254) 209027**



*PEMERINTAH KOTA SERANG*  
*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*  
**(BPKAD)**

*Jl. Jendral Sudirman No. 5 Serang, Banten Telp. (0254) 209027 Fax (0254) 209072*

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KOTA SERANG**

**Nomor : 900 / Kep. 056.1 - BPKAD /2022**

**tentang**

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BPKAD**  
**KOTA SERANG TAHUN 2023**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Serang Nomor 23 tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023. Untuk pelaksanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKAD tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang;
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Renja BPKAD Kota Serang Tahun 2023.

**KEDUA** : Renja sebagaimana Diktum Pertama dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan

### **BAB IV NIHIL**

### **BAB V PENUTUP**

**KETIGA** : RENJA sebagaimana Diktum Kedua merupakan pedoman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan program kegiatan Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Serang, 30 Maret 2022  
Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Serang



WACHYU B KRISTIawan  
NIP. 19741003 199311 1 003



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur Kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 ini telah selesai disusun.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Serang yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan sesuai dengan amanat dalam RPJMD Kota Serang.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu segala kritik, saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Renja pada tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 ini dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Serang.

Serang, 30 Maret 2022

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Serang



**WACHYU B KRISTIawan**

NIP. 19741003 199311 1 003



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1      Latar Belakang	1
1.2      Landasan Hukum	3
1.3      Maksud dan Tujuan	4
1.4      Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1.     Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2.     Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	24
2.3.     Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4.     Review terhadap Rancangan RKPD	34
2.5.     Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1.     Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	36
3.2.     Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3.     Program, Kegiatan dan sub kegiatan	40
<b>BAB IV    NIHIL</b>	46
<b>BAB V     PENUTUP</b>	48





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mempunyai Rencana Pembangunan Tahunan (Renja OPD) yang merupakan penjabaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.

Oleh karena itu berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perlu disusun RKPD Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan KUA-PPA yang nantinya ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2019-2023. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023 juga sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023 dimana dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023, disebutkan pada Bab I Pendahuluan bahwa RKPD Kota Serang tahun 2023 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2018-2023.

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta



masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Proses penyusunan Renja OPD dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan Renja OPD. Pada tahap ini disusun rancangan keputusan Kepala OPD tentang pembentukan tim penyusunan Renja OPD, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renja OPD, kemudian disusun agenda kerja tim penyusun Renja OPD sesuai dengan jadwal penyusunan RKPD serta mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- b. Penyusunan Rancangan Renja OPD. Pada tahap ini dirumuskan substansi rancangan Renja OPD yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya rumusan substansi tersebut dituangkan dalam sistematika dokumen rancangan Renja OPD.
- c. Pelaksanaan Forum OPD, yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.
- d. Penetapan Renja OPD. Selaras dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, perlu dilakukan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang telah disusun menjadi Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan indikator kinerja kegiatan dengan tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 dan Renstra BPKAD yang telah ditetapkan.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;



8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang;
9. Peraturan Walikota No. 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2020
10. Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang;
11. Peraturan Walikota Serang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2023 bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.

Tujuan dibuatnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di BPKAD agar terarah;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Menjadikan Pedoman dalam Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang pada tahun 2023;
4. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan, Sub kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023.

Dengan demikian dokumen Renja BPKAD Tahun 2023 ini sebagai pedoman dan arah di dalam menyusun anggaran BPKAD dan sebagai dasar



penentuan KUA dan PPAS, serta RKA APBD Tahun Anggaran 2023 oleh Kepala BPKAD Kota Serang.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, kegiatan, dan sub kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. NIHIL

##### **BAB V PENUTUP**

---

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang sebagai Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan evaluasi kegiatan yang menjadi kewenangan pada BPKAD Kota Serang yaitu pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dinilai dari sisi pengelolaan pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah serta dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan, pada Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang melaksanakan 2 Program yang terdiri dari 12 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.593.842.413 dan realisasi sebesar Rp.26.070.943.579 atau 88,10 %, dengan rincian: realisasi diatas 90% sebanyak 47 sub kegiatan, realisasi antara 80% - 90% sebanyak 8 sub kegiatan, realisasi antara 70% - 80% sebanyak 2 sub kegiatan , dan realisasi di bawah 60% sebanyak 3 sub kegiatan.

Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan dari 60 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021, realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan terdapat 60 sub kegiatan dan realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan terdapat 1 sub kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah

Alasan : *Realisasi anggaran bergantung kepada output yang dihasilkan BPN selaku lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi tanah, dalam pelaksanaan masih banyak permohonan sertifikasi yang belum diselesaikan sehingga berpengaruh terhadap serapan anggaran.*

Pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan seperti yang diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan badan dilakukan secara efisien dan efektif. Dilihat dari persentase pencapaian target / rencana tingkat capaian per kegiatan, hampir semua kegiatan dilaksanakan dengan persentase pencapaian target / rencana tingkat capaian lebih besar dari 100 % karena target fisik terpenuhi dengan anggaran yang masih tersisa sehingga tercipta efisiensi anggaran.

Adapun dari sisi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 2 Program, 12 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Program merupakan instrument kebijakan dimana didalamnya memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan telah ditetapkan dan memperoleh persetujuan alokasi anggaran . Program strategis yang di rencanakan oleh BPKAD Kota Serang harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang secara efektif dan efisien. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang pada tahun 2021 terdapat 2 Program, 12 Kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan, kegiatan- kegiatannya adalah :
  1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, sub kegiatannya adalah:
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
    - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA – SKPD
    - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD
    - e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA – SKPD

- 
- f. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    - g. Evaluasi kinerja perangkat daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Koordiansi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
    - c. koordiansi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
  3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - c. Penyediaan peralatan Rumah Tangga
    - d. Penyediaan bahan logistik kantor
    - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - f. Fasilitas kunjungan tamu
    - g. Penyediaan bahan bacaan dan peaturan perundang-undangan
    - h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Pengadaan Mebel
    - b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
    - c. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Penyediaan jasa surat menyurat
    - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor



- 
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatannya adalah:
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  - c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah kegiatan- kegiatannya adalah:
    1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, sub kegiatannya adalah:
      - a. Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
      - b. Koordiansi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS
      - c. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA – SKPD
      - d. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA – SKPD
      - e. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA – SKPD
      - f. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA – SKPD
      - g. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepa daerah tentang penjabaran APBD
      - h. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
      - i. Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran
      - j. Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan
      - k. Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah
    2. Koordiansi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, sub kegiatannya adalah:
      - a. Koordinasi dan pengelolaan kas daerah
      - b. Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
      - c. Penatausahaan pembiayaan daerah
      - d. Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteran perhitungan Fihak ketiga
      - e. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, sub kegiatannya adalah:
  - a. Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah
  - b. Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban
  - c. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
  - d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota
  - e. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
  - f. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - g. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah
  - h. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
  - i. Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, kegiatan-kegiatannya adalah :
  1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Penyusunan standar harga
    - b. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
    - c. penatausahaan barang milik daerah
    - d. Inventarisasi barang milik daerah
    - e. Pengamanan barang milik daerah
    - f. Penilaian barang milik daerah
    - g. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah
    - h. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah
    - i. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah

- j. Penyusunan laporan barang milik daerah
- k. Pembinaan pengelolaan barangmilik daerah pemerintah kabupaten/kota

Jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 29.593.842.413 dan realisasi sebesar Rp.26.070.943.579 atau 88,10 %, uraian kegiatan beserta capaian indikator outputnya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Penunjang Urusan Pemerintahan BPKAD Kota Serang yang terdiri dari 8 kegiatan, realisasi anggaran sebesar 89,79%. Dan realisasi capaian kinerja sebesar 100%, kegiatannya terdiri dari :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 903.992.920 dari target Rp. 982.092.500 atau 92,05%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 264.307.920 dari target Rp 271.000.000 atau 97,53%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 5 dokumen dari target 5 dokumen atau 100%.
  - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 93.059.000 dari target Rp 93.500.000 atau 99,53%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
  - ❖ Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA – SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 83.689.750 dari target Rp 85.151.250 atau 98,28%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
  - ❖ koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 284.281.250 dari target Rp 348.836.250 atau 81,49%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
  - ❖ Evaluasi kinerja perangkat daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 178.655.000 dari target Rp 183.605.000 atau 81,49%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 3 dokumen dari target 3 dokumen atau 100%.

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 16.122.045.792 dari target Rp. 18.319.574.982 atau 88,00% dan capaian kinerja terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi anggaran sebesar Rp 15.656.270.792 dari target Rp 17.852.604.982 atau 87,70%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%.
  - ❖ Koordiansi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 141.844.000 dari target Rp 142.615.000 atau 99,46%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
  - ❖ koordiansi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 323.931.000 dari target Rp 324.355.000 atau 99,87%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 117.580.000 dari target Rp. 117.600.000 atau 99,98%, dan capaian kinerja terealisasi 12 bulan dari target 12 bulan atau 100 %, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp. 117.580.000 dari target Rp. 117.600.000 atau 99,98%, dan capaian kinerja terealisasi 12 bulan dari target 12 bulan atau 100 %.
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 39.600.000 dari target Rp. 40.000.000 atau 99,00% dan capaian kinerja terealisasi 1 kegiatan dari target 1kegiatan atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Pengadaan pakaian dinas beserta atribut realisasi anggaran sebesar Rp. 39.600.000 dari target Rp. 40.000.000 atau 99,00% dan capaian kinerja terealisasi 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%.

- Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 977.451.105 dari target Rp. 982.650.902 atau 99,47% dan capaian kinerja terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 47.689.000 dari target Rp 49.331.103 atau 96,67%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 197.654.000 dari target Rp 198.517.351 atau 99,57%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyediaan bahan logistik kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 165.426.000 dari target Rp 165.820.306 atau 99,76%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, realisasi anggaran sebesar Rp 331.188.050 dari target Rp 332.790.979 atau 99,52%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyediaan bahan bacaan dan peaturan perundang-undangan, realisasi anggaran sebesar Rp 59.872.000 dari target Rp 60.026.163 atau 99,74%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Fasilitas kunjungan tamu, realisasi anggaran sebesar Rp 15.000.000 dari target Rp 15.000.000 atau 100,00%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 160.622.055 dari target Rp 161.165.000 atau 99,87%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 343.600.000 dari target Rp. 359.781.550 atau 95,50%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, realisasi anggaran sebesar Rp 178.600.000 dari target Rp 179.781.550 atau 99,34%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, realisasi anggaran sebesar Rp 165.000.000 dari target Rp 180.000.000 atau 91,67%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 636.086.881 dari target Rp. 676.252.229 atau 94,06%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Penyediaan jasa surat menyurat, realisasi anggaran sebesar Rp 47.476.000 dari target Rp 48.000.000 atau 98,91%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, realisasi anggaran sebesar Rp 272.356.381 dari target Rp 307.000.000 atau 88,72%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 316.254.500 dari target Rp 321.252.229 atau 98,44%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.292.684.500 dari target Rp. 1.358.632.000 atau 95,15%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:

- ❖ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, realisasi anggaran sebesar Rp 948.268.400 dari target Rp 1.013.500.000 atau 93,56%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, realisasi anggaran sebesar Rp 194.691.100 dari target Rp 195.132.000 atau 99,77%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, realisasi anggaran sebesar Rp 149.725.000 dari target Rp 150.000.000 atau 99,87%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 gedung dari target 2 gedung atau 100%.
2. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 3 kegiatan realisasi anggaran sebesar 91,92% dan realisasi capaian kinerja sebesar 100%, kegiatannya terdiri dari:
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.390.064.100 dari target Rp. 2.651.513.000 atau 90,14%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
    - ❖ Penyusunan KUA dan PPAS, realisasi anggaran sebesar Rp 580.365.500 dari target Rp 614.482.000 atau 94,45%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
    - ❖ Penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, realisasi anggaran sebesar Rp 117.466.000 dari target Rp 219.621.000 atau 53,49%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
    - ❖ Penyusunan dan Review RKA SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 163.125.000 dari target Rp 164.189.000 atau 99,35%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 33 OPD dari target 33 OPD atau 100%.
    - ❖ Penyusunan dan Review Perubahan RKA SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 143.775.000 dari target Rp 164.060.000 atau 87,64%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 33 OPD dari target 33 OPD atau 100%.

- 
- ❖ Penyusunan dan Review DPA SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 27.145.000 dari target Rp 31.200.000 atau 87,00%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyusunan dan Review Perubahan DPA SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 25.720.000 dari target Rp 31.200.000 atau 82,44%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, realisasi anggaran sebesar Rp 363.615.050 dari target Rp 378.659.000 atau 96,03%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
  - ❖ penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, realisasi anggaran sebesar Rp 562.127.100 dari target Rp 598.768.000 atau 93,88%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyusunan regulasi bidang anggaran, realisasi anggaran sebesar Rp 113.297.800 dari target Rp 124.655.000 atau 99,87%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 OPD dari target 2 OPD atau 100%.
  - ❖ Koordinasi perencanaan anggaran Pendapatan daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 124.855.000 dari target Rp 153.504.000 atau 81,34%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 9 OPD dari target 9 OPD atau 100%.
  - ❖ Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 168.572.650 dari target Rp 171.175.000 atau 98,48%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 33 OPD dari target 33 OPD atau 100%.
  - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 989,892,510 dari target Rp. 1.094,046,250 atau 90,48%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 14276 dokumen dari target 14276 dokumen atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:



- ❖ Koordinasi dan pengelolaan kas daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 161.096.510 dari target Rp 199.559.000 atau 80,73%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 3 dokumen dari target 3 dokumen atau 100%.
- ❖ Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D, realisasi anggaran sebesar Rp 281.210.000 dari target Rp 282.833.000 atau 99,43%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 3 Kegiatan dari target 3 Kegiatan atau 100%.
- ❖ Penatausahaan Pembiayaan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 243.916.000 dari target Rp 283.613.000 atau 86,00%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 Kegiatan dari target 2 Kegiatan atau 100%.
- ❖ Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan Pihak ketiga, realisasi anggaran sebesar Rp 210.700.000 dari target Rp 233.537.250 atau 90,22%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 115 orang dari target 115 orang atau 100%.
- ❖ Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait, realisasi anggaran sebesar Rp 92.970.000 dari target Rp 94.504.000 atau 98,38%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 4 dokumen dari target 4 dokumen atau 100%.
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.325.930.750 dari target Rp. 1.374.073.000 atau 96,50%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 294.570.000 dari target Rp 284.865.000 atau 99,87%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 4 dokumen dari target 4 dokumen atau 100%.
  - ❖ Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, realisasi anggaran sebesar Rp 58.197.500 dari target Rp 63.220.000 atau 92,06%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 4 dokumen dari target 4 dokumen atau 100%.

- ❖ Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 266.573.500 dari target Rp 268.632.250 atau 99,23%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
  - ❖ Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan kabupaten/kota, realisasi anggaran sebesar Rp 366.625.750 dari target Rp 396.809.750 atau 92,39%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
  - ❖ Rekonsiliasi Realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan, realisasi anggaran sebesar Rp 59.065.000 dari target Rp 61.692.000 atau 95,74%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 64.920.000 dari target Rp 82.210.000 atau 78,97%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 27.900.000 dari target Rp 27.985.000 atau 99,70%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
  - ❖ Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota, realisasi anggaran sebesar Rp 188.079.000 dari target Rp 188.659.000 atau 99,69%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 198 dokumen dari target 198 dokumen atau 100%.
3. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Capaian Kinerja yang terdiri dari 1 kegiatan realisasi anggaran sebesar 87,46% dan realisasi capaian kinerja sebesar 100% kegiatannya terdiri dari :
- Pengelolaan Barang Milik Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.432.261.380 dari target Rp. 1.637.626.000 atau 87,46%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100%, sub kegiatannya terdiri dari:

- ❖ Penyusunan Standar Harga, realisasi anggaran sebesar Rp. 197,931,000 dari target Rp. 200,834,000 atau 98,55 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 Dokumen dari target 2 Dokumen atau 100%
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 77,983,000 dari target Rp. 79,258,000 atau 98,39 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 198 Orang dari target 198 Orang atau 100%
- ❖ Penatausahaan barang milik daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 305,860,000 dari target Rp. 309,918,000 atau 98,69 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%
- ❖ Inventarisasi BMD, realisasi anggaran sebesar Rp. 59,880,000 dari target Rp. 61,479,000 atau 99,62 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%
- ❖ Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum barang milik daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 162,765,880 dari target Rp. 291,980,000 atau 55,75 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 36 dokumen dari target 36 dokumen dan 40 plang dari target 40 plang atau 100%
- ❖ Penilaian Barang Milik Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 165,392,000 dari target Rp. 217,450,000 atau 76,06 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
- ❖ Koordinasi Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 48,079,000 dari target Rp. 49,468,000 atau 97,19 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
- ❖ Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 69,601,500 dari target Rp. 70,936,000 atau 98,12 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
- ❖ Koordinasi pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 74,005,000 dari target



---

Rp. 74,230,000 atau 99,70 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 4 dokumen dari target 4 dokumen atau 98,00%.

- ❖ konsolidasi Penyusunan laporan barang milik daerah dari SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp. 30,535,000 dari target Rp. 31,469,000 atau 97,03 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
- ❖ Koordinasi dan Pembinaan pengelolaan barang milik daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 240,229,000 dari target Rp. 250,604,000 atau 95,86 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 198 orang dari target 198 orang atau 100%.





## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang maka dibentuklah Peraturan Walikota Serang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diuraikan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang merupakan perangkat daerah/institusi yang membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Kota Serang. Terkait dengan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Badan yang membawahkan :



- 
- a. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
    2. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
    3. Sub Bagian Keuangan
  - b. Bidang Anggaran, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perumusan Kebijakan APBD
    2. Sub Bidang Penyusunan APBD
    3. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran
  - c. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perbendaharaan I
    2. Sub Bidang Perbendaharaan II
    3. Sub Bidang Kas Daerah
  - d. Bidang Penatausahaan Aset Daerah, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perencanaan Aset Daerah
    2. Sub Bidang Pencatatan Aset Daerah
    3. Sub Bidang Pelaporan Aset Daerah
  - e. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
    2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
    3. Sub Bidang Pelaporan



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang didukung oleh 38 pegawai dengan perincian sesuai dengan data pada Bulan Maret Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1**

Kondisi kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang hingga akhir desember 2021 secara singkat dipaparkan dalam table berikut :

**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SERANG  
KEADAAN PER MARET 2022**

NO	NAMA BIDANG	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SLTA	D.II	D.III	S1	S2	
1	SEKRETARIAT	1	-	2	6	3	12
2	PERBENDAHARAAN	2	-	1	3	3	9
3	ANGGARAN	-	-	-	3	4	7
4	AKUNTANSI	-	-	-	3	2	5
5	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	1	2	2	5
JUMLAH		3	0	4	17	14	38

**Tabel 2.1.2**

**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SERANG  
KEADAAN PER MARET 2022**

NO	NAMA BIDANG	GOLONGAN																JML
		I				II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	SEKRETARIA	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	6	-	-	1	1	-	12





	T																	
2	PERBENDAHARAAN	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	9
3	ANGGARAN	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	-	-	-	7
4	AKUNTANSI	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	5
5	PENATAUSAHAAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	5
	JUMLAH	0	0	0	0	0	1	5	0	4	0	11	10	5	1	1	0	38

Tabel 2.1.3

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN ESSELON  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SERANG  
KEADAAN PER MARET 2022

NO	URAIAN	JUMLAH JABATAN	JUMLAH PEJABAT (Orang )
1	Pejabat Eselon II	1	1
2	Pejabat Eselon III A	1	1
3	Pejabat Eselon III B	5	5
4	Pejabat Eselon IV A	20	20
5	Fungsional Umum	3	3
	JUMLAH	30	30

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang telah menentukan visi dan misinya yaitu sebagai berikut:

---

## 1. VISI

Visi merupakan pandangan kedepan yang dapat diyakini oleh banyak orang untuk saling bekerjasama dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Visi memegang peranan penting dalam menentukan kemana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang. maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang menetapkan Visi Tahun 2019 - 2023 berdasarkan RPJMD Adalah sebagai berikut :

*“ Terwujudnya Kota Peradaban Yang Berdaya dan Berbudaya  
2019 - 2023”.*

## 2. MISI

Misi adalah sesuatu yang disusun agar dapat mensukseskan Visi yang telah ditetapkan. Dengan misi yang telah ditetapkan maka organisasi tersebut akan terlihat arah dan gerakan dari apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Isi Misi seyogyanya adalah langkah-langkah ataupun tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut walaupun masih belum spesifik. Adapun Misi BPKAD Kota Serang adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan perangkat daerah/institusi yang membantu Walikota dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan menunjukkan bahwa keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang sangat strategis dan menjadi faktor dominan terciptanya penyelenggaraan Pemerintah Kota Serang yang baik sesuai kaidah *good governance*.

Sebagai faktor yang dominan agar terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Kota Serang yang memenuhi kriteria *good governance* yaitu pemerintahan yang baik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel salah satunya dalam pengelolaan keuangan dan aset , maka Badan Pengelolaan



---

Keuangan dan Aset Daerah dituntut senantiasa meningkatkan perbaikan kinerja, mutu pelayanan, dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Apalagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang juga bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu:

1. Pembayaran belanja daerah,
3. Pembayaran bantuan keuangan / hibah, dan belanja tidak terduga.

Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga melayani pengelolaan keuangan SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kota Serang, meliputi;

1. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA - SKPD)
2. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA - SKPD)
3. Melayani dan memfasilitasi penatausahaan keuangan (SPD, SPP, SPM, dan SP2D)
4. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Laporan Keuangan

Secara garis besar gambaran kinerja pelayanan OPD dapat dilihat pada tabel 2.2 yang mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.





---

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penentuan isu-isu strategis ini BPKAD Kota Serang melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan BPKAD Kota Serang lebih baik. Adapun isu-isu strategis itu adalah:

1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Profesionalitas dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dan Perkembangan Iptek;

Ukuran ataupun indikator atas profesionalisme adalah bagaimana pelaksanaan dilapangan ataupun pekerjaan sesuai dengan penetapan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Kredibilitas dari BPKAD Kota Serang sendiri sebagai sebuah lembaga dituntut untuk dapat bekerja secara profesional adalah sebagai keharusan untuk dapat mendapatkan kepercayaan dari publik karena sifat dan pekerjaan dari BPKAD ini adalah sebagai pelayanan publik. Profesionalisme ini sangat tergantung dari pendayagunaan dan pengoptimalisasian pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini seyogyanya menjadikan sebuah tantangan dan terobosan untuk perbaikan organisasi BPKAD Kota Serang. Peningkatan dalam pembaharuan (*updating*) kemampuan individu terhadap perkembangan teknologi dirasakan harus diselaraskan dengan baik. Oleh karenanya pendayagunaan sumberdaya manusia dengan perkembangan iptek haruslah sejalan dan selaras guna mendukung pada program profesionalisme itu sendiri.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas SDM dan Koordinasi Internal sesuai Perundang-undangan;

Dalam ruang lingkup manajemen keuangan daerah faktor sarana dan



prasarana sangatlah penting. Ketika tuntutan akan profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi menjadi sebuah keharusan maka hal tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang. Sehingga indikator keberhasilan ataupun evaluasi pelaksanaan dilapangan akan terlihat jelas. Faktor ini sangat berpengaruh pada kualitas dan koordinasi internal. Adapun peningkatan sarana dan prasarana ini tentunya mengacu pada perundang-undangan yang ada. Harus diakui bahwa untuk mencapai garis ideal ternyata dalam pengaplikasian dilapangan tidaklah mudah. Banyaknya variabel yang sangat signifikan mempengaruhi disandingkan dengan dana yang terbatas juga merupakan indikator penghambat. Oleh karenanya untuk memberikan pelayanan yang ideal dan sesuai dengan teori yang ada tentunya masih memerlukan langkah yang panjang. Tetapi dengan keterbatasan ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap berkomitmen untuk bekerja mensukseskan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Namun demikian, sampai saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah untuk menjadi instansi yang dapat mengelola keuangan dan aset daerah secara jujur, transparan, dan taat azas dengan hasil yang terukur sesuai ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, antara lain;

1. Sebagian pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang mempunyai pengetahuan, pemahaman terhadap peraturan, dan penguasaan teknis pekerjaan maupun teknologi informasi belum mencapai standar yang dibutuhkan.
2. Masih perlunya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk beberapa bidang pekerjaan tertentu.



3. Sistem teknologi informasi yang ada masih terpisah-pisah, perlu upaya untuk mengintegrasikannya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Sistem pengendalian internal yang masih perlu terus disempurnakan.
5. Sebagai instansi yang menjadi gerbang pertama penyusunan anggaran, salah satu tanggung jawabnya adalah mengurangi in-efisiensi/ pemborosan dalam penganggaran dan ketidaktepatan dalam penentuan prioritas penganggaran. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kecermatan dalam mengevaluasi usulan rencana yang diajukan.
6. Masih adanya aset Pemerintah Kota Serang yang belum terdata atau tersertifikat atau diklaim pihak lain.

Selain permasalahan yang dihadapi terdapat pula tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan diantaranya :

#### **Tantangan Eksternal**

1. Ketidakstabilan ekonomi dan suhu politik yang ada di Indonesia serta imbasnya kepada daerah secara nyata berimbas pada perekonomian mikro;
2. Kebebasan media dan informasi yang secara jelas memberikan suatu akses yang bebas terhadap informasi dan transparansi dari pengelolaan keuangan;
3. Perubahan perundangan-undangan yang cepat, sehingga mendorong penatausahaan keuangan dihadapkan pada kondisi yang tidak sesuai;

#### **Peluang Eksternal**

1. Dalam kurun waktu pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010-2015 tren laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif
2. Iklim investasi yang kondusif;



## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa penyusunan Renja OPD BPKAD telah mendasar pada rancangan awal RKPD Tahun 2022 dan secara fokus mengakomodir hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab BPKAD. Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif maupun politis. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah merencanakan 2 program, 12 kegiatan dan 60 sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 27.299.962.000 ,-. Namun berdasarkan hasil analisis kebutuhan lebih lanjut terhadap RKPD tersebut, anggaran pada APBD Murni Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 36.310.580.613,-

Secara rinci, perbandingan antara rancangan awal RKPD Murni Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan yang dituangkan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.





---

## **2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

BPKAD merupakan OPD teknis yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat.





---

## **2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

BPKAD merupakan OPD teknis yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat.





---

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**NIHIL**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 - 2023 merupakan pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023 pada dasarnya merupakan perencanaan kegiatan selama 1 tahun ke depan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dimana keberhasilan dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi, dan komitmen yang kuat dari seluruh personil.

Adapun sebagai alat perencanaan dan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran yang akan dituangkan dalam APBD Kota Serang Tahun 2023, Renja BPKAD Kota Serang memiliki kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

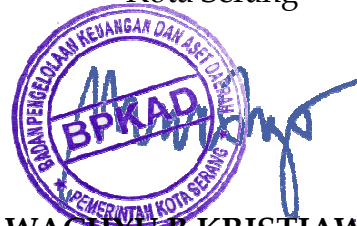
1. Renja BPKAD Kota Serang Tahun 2023 berisi perencanaan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan alternatif sumber pembiayaannya;
2. Seluruh jajaran pegawai pada BPKAD Kota Serang berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program Renja BPKAD Kota Serang Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2023, Renja BPKAD Kota Serang Tahun 2023 ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam perencanaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.



4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Renja BPKAD Kota Serang Tahun 2023, maka dilakukan pemantauan dan analisa terhadap penjabaran dan sinergisitasnya ke dalam rencana program dan kegiatan yang terdapat pada Bidang-bidang, serta kelanjutannya dengan pelaksanaan program,kegitatan dan sub kegiatan sebelumnya.

Serang, 30 Maret 2022

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Serang



**WACHYU B KRISTIAWAN**

NIP. 19741003 199311 1 003

Tabel 3.1

## Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

## BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SERANG

IDANG URUSA	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING				PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA		PENANGGUNGJAWA B (OPD DAN UNIT OPD)	LOKASI			
							KEGIATAN			2021		2022		2024		2025		2026							
							SUB KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Keuangan	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Baik dan Akuntabel					Capaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP			WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BPKAD	KOTA SERANG		
							Capaian Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100								
							Capaian Tertib Pengelolaan BMD	%	90	26.070.943.579	90	34.674.954.148	90	44.608.500.000	90	49.034.700.000	90	53.938.170.000	90	147.581.370.000					
							Capaian Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	100		100		100		100		100		100						
							Capaian Ketepatan Waktu Penganggaran	%	100		100		100		100		100		100						
			5	02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	100	19.932.794.839	100	24.535.615.308	100	28.018.500.000	100	30.785.700.000	100	33.864.270.000	100	92.668.470.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
			5	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	100	903.992.920	100	1.694.807.250	100	1.720.000.000	100	1.892.000.000	100	2.081.200.000	100	5.693.200.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
			5	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	264.307.920	5	520.385.750	5	480.000.000	5	528.000.000	5	580.800.000	5	1.588.800.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
			5	02	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	93.059.000	1	136.501.000	1	240.000.000	1	264.000.000	1	290.400.000	1	794.400.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
			5	02	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	83.689.750	1	157.829.000	1	130.000.000	1	143.000.000	1	157.300.000	1	430.300.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
			5	02	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			1	99.251.000	1	120.000.000	1	132.000.000	1	145.200.000	1	397.200.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
			5	02	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			1	86.515.000	1	120.000.000	1	132.000.000	1	145.200.000	1	397.200.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
			5	02	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	2	284.281.250	2	341.890.000	2	260.000.000	2	286.000.000	2	314.600.000	2	860.600.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
			5	02	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	178.655.000	1	352.435.500	2	370.000.000	2	407.000.000	2	447.700.000	2	1.224.700.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	%	100	15.621.799.433	100	17.364.493.839	100	17.801.000.000	100	19.581.100.000	100	21.539.210.000	100	58.921.310.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG			
5	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	15.156.024.433	12	16.655.316.339	12	17.071.000.000	12	18.778.100.000	12	20.655.910.000	12	56.505.010.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG			
5	02	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	141.844.000	2	178.116.000	2	180.000.000	2	198.000.000	2	217.800.000	2	595.800.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG			



	5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan	12	323.931.000	12	531.061.500	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	<b>1.820.500.000</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>KOTA SERANG</b>
	5	02	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah	%	100	<b>117.580.000</b>	100	<b>81.080.000</b>	100	<b>181.500.000</b>	100	<b>165.000.000</b>	100	<b>181.500.000</b>	100	<b>528.000.000</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>KOTA SERANG</b>
	5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	117.580.000	12	81.080.000	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	<b>496.500.000</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>KOTA SERANG</b>
	5	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	%	90	39.600.000	90	<b>108.350.000</b>	100	<b>300.000.000</b>	100	<b>330.000.000</b>	100	<b>363.000.000</b>	100	<b>993.000.000</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>KOTA SERANG</b>

5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	40	39.600.000	40	108.350.000	38	120.000.000	38	132.000.000	38	145.200.000	38	397.200.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Orang					100	180.000.000	100	198.000.000	100	217.800.000	100	595.800.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	%	100	977.451.105	100	1.432.819.871	100	2.053.000.000	100	2.258.300.000	100	2.484.130.000	100	6.795.430.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	47.689.000	12	101.767.500	12	110.000.000	12	121.000.000	12	133.100.000	12	364.100.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	197.654.000	12	198.763.300	12	200.000.000	12	220.000.000	12	242.000.000	12	662.000.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	165.426.000	12	125.440.000	12	130.000.000	12	143.000.000	12	157.300.000	12	430.300.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	331.188.050	12	414.929.750	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	1.820.500.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Dokumen	12	59.872.000	12	41.520.000	12	160.000.000	12	176.000.000	12	193.600.000	12	529.600.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	15.000.000	12	14.000.000	12	33.000.000	12	36.300.000	12	39.930.000	12	109.230.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	12	160.622.055	12	536.399.321	12	750.000.000	12	825.000.000	12	907.500.000	12	2.482.500.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					1	120.000.000	1	132.000.000	1	145.200.000	1	397.200.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tingkat Ketersediaan Barang Milik Daerah	%	100	343.600.000	100	1.669.595.018	100	2.880.000.000	100	3.168.000.000	100	3.484.800.000	100	9.532.800.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit					4	1.320.000.000	4	1.452.000.000	4	1.597.200.000	4	4.369.200.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit					10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.500.000	10	165.500.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	135	178.600.000	135	877.270.018	15	850.000.000	15	935.000.000	15	1.028.500.000	15	2.813.500.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	165.000.000	3	660.000.000	3	660.000.000	3	726.000.000	3	798.600.000	3	2.184.600.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tingkat ketersediaan layanan Jasa Penunjang PD	%	100	636.086.881	100	761.423.430	100	980.000.000	100	1.078.000.000	100	1.185.800.000	100	3.243.800.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	3600	47.476.000	3600	50.000.000	12	80.000.000	12	88.000.000	12	96.800.000	12	264.800.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	272.356.381	12	343.436.930	12	400.000.000	12	440.000.000	12	484.000.000	12	1.324.000.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	316.254.500	12	367.986.500	12	500.000.000	12	550.000.000	12	605.000.000	12	1.655.000.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	100	1.292.684.500	100	1.423.045.900	100	2.103.000.000	100	2.313.300.000	100	2.544.630.000	100	6.960.930.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	948.268.400	12	889.855.900	36	1.300.000.000	36	1.430.000.000	36	1.573.000.000	36	4.303.000.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	12	194.691.100	12	234.215.000	36	303.000.000	36	333.300.000	36	366.630.000	36	1.002.930.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG

5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	12	149.725.000	12	298.975.000	36	500.000.000	36	550.000.000	36	605.000.000	36	1.655.000.000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
	5	02	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penganggaran	%	100		100		100		100		100		100	33.298.600.000		KOTA SERANG
						Capaian sistem pengelolaan keuangan daerah persentase kesesuaian pelaporan dengan standard akuntansi pemerintahan	%	100	4.705.887.360	100	7.120.222.700	100	10.060.000.000	100	11.066.000.000	100	12.172.600.000	100	0		KOTA SERANG
							%	100		100		100		100		100		100	0		KOTA SERANG
5	02	02	2.01		Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Capaian Ketepatan waktu Penganggaran	%	81,25	2.390.064.100	81,25	3.210.178.270	100	3.850.000.000	100	4.235.000.000	100	4.658.500.000	100	12.743.500.000		KOTA SERANG
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	33	580.365.500	33	647.506.383	1	770.000.000	1	847.000.000	1	931.700.000	1	2.548.700.000	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.01	02	Koordinasi penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	33	117.466.000	33	155.749.900	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	827.500.000	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.01	03	Koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	33	163.125.000	33	264.985.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	827.500.000	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.01	04	Koordinasi penyusunan dan perubahan RKA SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	33	143.775.000	33	252.358.000	1	170.000.000	1	187.000.000	1	205.700.000	1	562.700.000	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.01	05	Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	2	25.720.000	2	36.300.000	1	70.000.000	1	77.000.000	1	84.700.000	1	231.700.000	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.01	06	Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	2	27.145.000	2	37.000.000	1	120.000.000	1	132.000.000	1	145.200.000	1	397.200.000	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Dokumen	1	363.615.050	1	561.675.200	2	730.000.000	2	803.000.000	2	883.300.000	2	2.416.300.000	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Dokumen	2	562.127.100	2	409.514.900	2	500.000.000	2	550.000.000	2	605.000.000	2	1.655.000.000	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Dokumen	2	113.297.800	2	547.772.387	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	662.000.000	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.01	10	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Dokumen	9	124.855.000	9	121.961.500	1	180.000.000	1	198.000.000	1	217.800.000	1	595.800.000	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.01	11	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Dokumen	33	168.572.650	33	175.355.000	1	320.000.000	1	352.000.000	1	387.200.000	1	1.059.200.000	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.01	12	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Dokumen					1	120.000.000	1	132.000.000	1	145.200.000	1	397.200.000	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.01	13	Pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen					1	170.000.000	1	187.000.000	1	205.700.000	1	562.700.000	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Capaian Penerbitan SPD dan SP2D	Dokumen	100	989.892.510	100	2.250.809.930	276, 16000	3.200.000.000	276, 16000	3.520.000.000	276, 16000	3.872.000.000	276, 16000	10.592.000.000	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	3	161.096.510	3	239.269.790	3	450.000.000	3	495.000.000	3	544.500.000	3	1.489.500.000	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.02	03	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	3	281.210.000	3	986.832.500	3	950.000.000	3	1.045.000.000	3	1.149.500.000	3	3.144.500.000	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	2	243.916.000	2	404.855.000	2	500.000.000	2	550.000.000	2	605.000.000	2	1.655.000.000	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG

5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	115	210.700.000	115	470.366.240	1	800.000.000	1	880.000.000	1	968.000.000	1	2.648.000.000	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	4	92.970.000	4	149.486.400	4	500.000.000	4	550.000.000	4	605.000.000	4	1.655.000.000	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian pelaporan dengan standard akuntansi pemerintahan	%	100	1.325.930.750	100	1.659.234.500	100	3.010.000.000	100	3.311.000.000	100	3.642.100.000	100	9.963.100.000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	3	294.570.000	3	246.585.000	4	600.000.000	4	660.000.000	4	726.000.000	4	1.986.000.000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	4	58.197.500	4	248.597.750	4	650.000.000	4	715.000.000	4	786.500.000	4	2.151.500.000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2	266.573.500	2	467.923.500	2	450.000.000	2	495.000.000	2	544.500.000	2	1.489.500.000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1	366.625.750	1	369.550.250	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000	1	1.655.000.000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	59.065.000	1	29.050.000	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	496.500.000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen					1	130.000.000	1	143.000.000	1	157.300.000	1	430.300.000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	64.920.000	1	111.700.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	331.000.000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	27.900.000	1	47.990.000	1	80.000.000	1	88.000.000	1	96.800.000	1	264.800.000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	198	188.079.000	198	137.838.000	198	350.000.000	198	385.000.000	198	423.500.000	198	1.158.500.000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan BMD	%	100	1.432.261.380	100	3.019.116.140	80	6.530.000.000	80	7.183.000.000	80	7.901.300.000	80	21.614.300.000	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100	1.432.261.380	100	3.019.116.140	95	6.530.000.000	95	7.183.000.000	95	7.901.300.000	95	21.614.300.000	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	1	197.931.000	1	613.619.500	2	850.000.000	2	935.000.000	2	1.028.500.000	2	2.813.500.000	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Peserta Pembinaan Teknik BMD	Dokumen	198	77.983.000	198	151.427.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	827.500.000	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG

5	02	03	2.01	05	Penatausahaan BMD	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data BMD	Dokumen	1	305.860.000	1	301.370.000	1	400.000.000	1	440.000.000	1	484.000.000	1	<b>1.324.000.000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi BMD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	Dokumen	2	59.880.000	2	108.145.000	2	550.000.000	2	605.000.000	2	665.500.000	2	<b>1.820.500.000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01	07	Pengamanan BMD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perencana, Pemeliharaan / Perawatan BMD	Dokumen Plang	177/921	162.765.880	177/921	459.552.000	177,921	2.000.000.000	177,921	2.200.000.000	177,921	2.420.000.000	177,921	<b>6.620.000.000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01	08	Penilaian BMD	Jumlah Koordinasi Hasil Penilaian BMD	Dokumen	1	165.392.000	1	316.216.400	1	600.000.000	1	660.000.000	1	726.000.000	1	<b>1.986.000.000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	Dokumen	2	48.079.000	2	74.890.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	2	<b>331.000.000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Pengguna, Pemanfaatan, Pemindah Tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	Laporan	2	69.601.500	2	273.573.230	2	500.000.000	2	550.000.000	2	605.000.000	2	<b>1.655.000.000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Rekon BMD	Dokumen	4	74.005.000	4	341.196.010	12	500.000.000	12	550.000.000	12	605.000.000	12	<b>1.655.000.000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan Dokumen BMD	Dokumen	2	30.535.000	2	84.745.000	2	130.000.000	2	143.000.000	2	157.300.000	2	<b>430.300.000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis BMD	Orang	198	240.229.000	198	294.382.000	198	650.000.000	198	715.000.000	198	786.500.000	198	<b>2.151.500.000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG